

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

## **TEMA : Mengantisipasi Kecurangan dalam Pemilu 2014**

**Pengantar diskusi oleh:**

1. **Indra J. Piliang**, Ketua Badan Litbang Partai Golkar
2. **Ray Rangkuti**, Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)

**Moderator : Lola Amelia**, Manajer Program TII

### **Partisipan**

Peserta yang hadir +/- 20 orang. Peserta dari berbagai kalangan, seperti Pattiro, Sol Magz, Beritabatavia, STF Driyarkara, PDS, vivanews, Dewi Fortuna Institute, Hanura, STIE BP, Sawit Watch, IRI, Kompas, LIMA.

### **PEMBAHASAN**

#### **Ray Rangkuti**

Pemilu 2014 ini merupakan pemilu yang keempat. Hari ini akan saya bahas mengenai kecurangan, tetapi bukan hanya yang sekadar kecurangan yang administratif, tetapi juga asas pemilu yang jurdil. Sedikit akan saya ceritakan mengenai persoalan administratif -kesalahan administratif muncul karena ke-alpaan Negara dalam melakukannya. Orang kehilangan hak-haknya dalam berpolitik karena 'kesalahan negara' dalam hal administratif. Semestinya, dalam pemilu yang sekarang ini, hal-hal administratif ini tidak terjadi, seperti persoalan DPT, mogok memilih karena tidak terdaftar akibat kesalahan administratif (2,1 juta tidak punya NIK).

Kemudian, dari persoalan DPT akibat 'kesalahan administratif', maka akan memunculkan manipulasi politik dan/atau salah satu potensi kecurangan pemilu. Kemudian mengenai dana / data rekening caleg. Pertanyaannya kemudian, apakah KPU sudah melakukan pengawasan dan pencegahan yang tepat untuk ini. Terkait dengan hal ini, banyak pihak masih terfokus pada kecurangan akibat administratif ini. Menurut hemat saya, kecurangan dalam pemilu akan teratasi apabila persoalan-persoalan administrasi ini dapat teratasi, sehingga tidak perlu ada pengawasan.

Melihat kenyataan yang ada di lapangan, para caleg misalnya yang berkampanye di TV, seperti kuis kebangsaan dll, apakah sudah ditanya dan diperiksa darimana sumber pendanaannya? Seharusnya pihak badan pengawas bisa memeriksa hal ini, bahkan kita sebagai publik berhak atas informasi ini.

Masalah lainnya adalah mengenai penghitungan suara. Memang betul, ini adalah persoalan teknis, tetapi yang teknis ini sangat berakibat besar pada data (kemenangan) pemilu. Sudah diperbaiki dengan adanya penduplikasian formulir C1. Oleh karena itu, menurut saya saksi parpol yang menghabiskan dana hingga 1.5 triliun, tidak usah diadakan. Terkait dengan hal ini, saksi-saksi ini kemudian kompromi melakukan jual beli suara - partai yang tidak sampai ambang batas 3.5 (ini yang terjadi dalam pemilu sebelumnya, karena 'kertas fotokopi' tidak memiliki kekuatan hukum yang sama ke MK). Diharapkan dengan adanya penduplikasian

formulir C1 yang (juga) dimiliki oleh saksi memiliki kekuatan hukum yang sama. Kritik, seharusnya program unggulan Bawaslu adalah pemeriksaan sumber dana kampanye dan kampanye media, bukan rekrut relawan – yang sebenarnya tidak ada di UU. Hal ini agar akses setiap partai terhadap media memiliki kesempatan yang sama (akses kesamarataan).

### **Indra J. Piliang**

Untuk Indonesia, masalah kita ini *pertama*, masalah geografis, artinya ada desa-kota, sekarang kota semakin besar. Ini terkait dengan masuknya teknologi ke beberapa daerah terpencil – yang akan berdampak pada minimnya informasi yang sampai ke daerah, padahal (tentu) TPS juga ada di daerah-daerah. Persoala lainnya misal, ada beberapa suku, sebut saja Suku Badui, yang tidak diperbolehkan- oleh sukunya dalam beberapa hal tertentu termasuk memilih, ini dapat menjadi ‘potensi keuangan’. Sebenarnya, acuan kita untuk masa pemilu ini ada di TPS, ada di 560.000 TPS. Mengenai persoalan ada iklan massif di TV, itu sebenarnya merupakan komunikasi politik, jadi menurut saya bukan masalah utama.

Contoh lain, pada pemilu 2009 mengenai *quick count*. Di jadwal, pemilhan jam 7.00-13.00. Oleh karena itu penghitungan akan dimulai – sesuai WIB adalah jam 13.00 WIB. Di Jakarta jam 13, papua jam 15, makasar jam 14, kemudian muncul *quick qount* yang memunculkan adanya kemenangan atas partai tertentu. Padahal itu adalah ‘jam jakarta’, dimana justru Jakarta belum selesai memilih dibandingkan daerah lainnya.

Persoalan lainnya, adalah birokrasi. Tekanan atau intimidasi birokrasi (PNS yang diancam, karena ada anggota keluarganya yang melakukan ‘kritik politik’, yang diancam akan digeser jabatannya atau dimutasi). Tapi sulit diperiksa, padahal seringkali terjadi di pemilu-pemil sebelumnya.

Contoh lain, pada Pemilu 2009, di hari-H, banjir, dan kotak suara hanyut. Diberitakan demikian, namun ketika diperiksa, ternyata rekapitulasi suara itu masih ada. Sebelumnya memang diawasi (dari berbagai pihak), tetapi ketika hanya polisi yang mengawal (dari pihak partai tidak ada), maka kotak suara bisa dibongkar.

Contoh lain, masih pada Pemilu 2009, ada kotak suara yang ‘disandra’ oleh caleg dan kepala daerah. Untuk mengantisipasi hal ini, KPU dan/atau seluruh pihak penyelenggara, dan kotak suara, harus ‘dikarantina’ dan ‘sterilisasi’ secepatnya setelah proses pemilihan itu selesai (dari TPS hingga ke tingkat pusat). Dibuat juga sistem, agar pihak-pihak penyelenggara pemilu beserta keluarga, terbebas dari adanya intimidasi.

Terakhir, yang harus dipantau adalah mengenai proses sengketa di MK. Tahun 2009, saya lihat banyak kekacauan, salah satunya MA memutuskan kalau ada PKPU yang melanggar UU. Kemudian, ada keputusan intervensi dari MK, bahwa yang benar adalah yang menurut PKPU. Karena yang dipakain, putusan MK, maka ada beberapa kursi yang sebenarnya ‘harus berubah’.

Secara umum, kita optimis. Namun, optimisme itu muncul karena ada skeptisme itu begitu tinggi. Termasuk, pemilih kita juga sudah belajar banyak selama 15 tahun ini.

## FORUM DISKUSI

1. Ramlan Nugraha (Pattiro) : Mengenai persoalan administratif, seperti dana kampanye. Dana kampanye sudah dirilis, apakah meningkatkan akuntabilitas? Potensi kecurangan : bagaimana perlindungan terhadap surat suara, dan kotak suara yang 'rentan jeblos'.
2. Annas (TII) : Mengenai persoalan partisipasi, luar biasanya trik-trik yang dilakukan pada pemilu. Pertanyaannya, bagaimana peranan masyarakat untuk 'melindungi' suara mereka

### Narasumber:

Mengenai partisipasi, sebenarnya sudah didorong oleh UU, dan dibanyak praktek tahapan pemilu, sebenarnya partisipasi ini sudah muncul. Yang menjadi *concern* saya, bukan meningkatkan partisipasi, tetapi mewadahi partisipasi itu. Seharusnya lebih memperhatikan 'yang lebih besar', bukannya 'yang kecil', seperti pembagian nasi kotak, warna baju yang menjurus ke suatu partai tertentu dll. Seharusnya juga, untuk ukuran pemilu yang demokratis, penghitungan suara harus diadili oleh masyarakat.

Yang dimaksud politik uang, adalah apabila 'imbalan' dapat mempengaruhi kehendak pemilih, kalau memberi ongkos transportasi, makan, rokok, dll itu sebenarnya tidak termasuk politik uang. Kalau itu disertai dengan ajakan untuk mengubah preferensi, maka bisa dipidanakan atau termasuk politik uang. Kampanye *mah* bukan. Untuk menghapuskan politik uang, caranya satu : sejahterakan masyarakat, bukan dengan diberlakukannya sanksi, dll.

Dana kampanye memang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas. Namun, KPU terkesan 'suka buat peraturan', tetapi dalam tahap yang sama, tidak menegakkannya. Contoh, PKPU Dana Kampanye, yang 'aneh', misal ada tahap pertama pelaporan dan tahap kedua pelaporan. Bedanya apa?

Mengenai persoalan dana kampanye, banyak caleg yang ketakutan akan peraturan dana kampanye 'siapa yang terpilih, akan dikejar pengawas keuangan'

### Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH